

STRATEGI PENUMBUHAN KESADARAN PEKERJA SEKTOR INFORMAL TERHADAP KEPESENTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BPJS KETENAGAKERJAAN: ANALISIS DESKRIPTIF PADA PASAR WELERI KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH

DOI: <https://doi.org/10.31595/lindayosos.v7i1.1705>

Dina Setya Rahayu¹

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
Indonesia
Dinstyr19@gmail.com

Helly Ocktilia²

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
Indonesia
hellyocktilia2@gmail.com

Journal History

Received: 2 December 2025

Accepted: 19 December 2025

Published: 30 December 2025

ABSTRACT

Awareness-building strategies are essential to increase understanding and participation of informal sector workers in social protection programs. This study aims to describe the development of an awareness-building model for informal workers in Weleri Market in relation to their participation in the Employment Injury Insurance (JKK) and Death Insurance (JKM) programs of BPJS Ketenagakerjaan. Using a qualitative descriptive method, data were collected through in-depth interviews, observations, and document reviews. Informants consisted of representatives from BPJS Ketenagakerjaan, the Manpower Office, the Market Management Unit (UPTD), and Weleri Market traders. The findings indicate that existing outreach efforts such as direct socialization, printed media, social media, and the JMO application have not been implemented consistently and are not yet fully accessible or understood by informal workers. Participation is shaped by internal factors (self-awareness, understanding of benefits, family support) and external factors (service access, age, digital literacy). Based on these findings, the study formulates the JEMPOL TANGGUH model (Jaminan Sosial Pekerja Lokal Tanggap, Unggul, dan Humanis) as a community-based strategy to strengthen workers' awareness and participation. This model emphasizes structured, continuous, and contextual interventions through multi-stakeholder involvement, aiming to enhance information delivery, improve worker capacity, and build a more inclusive and responsive social protection ecosystem in traditional market settings.

KEYWORDS: Awareness building, Informal workers, Social protection, JEMPOL TANGGUH.

ABSTRAK

Strategi peningkatan kesadaran merupakan upaya penting untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pekerja sektor informal dalam program perlindungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengembangan model peningkatan kesadaran bagi pekerja informal di Pasar Weleri terkait keikutsertaan mereka dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Informan terdiri atas perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan, Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Pasar, serta para pedagang Pasar Weleri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya sosialisasi yang ada, seperti sosialisasi langsung, media cetak, media sosial, dan aplikasi JMO, belum dilaksanakan secara konsisten dan belum sepenuhnya dapat diakses maupun dipahami oleh pekerja informal. Partisipasi pekerja dipengaruhi oleh faktor internal



(kesadaran diri, pemahaman manfaat, dukungan keluarga) serta faktor eksternal (akses layanan, usia, literasi digital). Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan model JEMPOL TANGGUH (Jaminan Sosial Pekerja Lokal Tanggap, Unggul, dan Humanis) sebagai strategi berbasis komunitas untuk memperkuat kesadaran dan partisipasi pekerja. Model ini menekankan intervensi yang terstruktur, berkelanjutan, dan kontekstual melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan, dengan tujuan meningkatkan penyampaian informasi, memperkuat kapasitas pekerja, serta membangun ekosistem perlindungan sosial yang lebih inklusif dan responsif di lingkungan pasar tradisional.

Kata Kunci: Peningkatan kesadaran, Pekerja informal, Perlindungan sosial, JEMPOL TANGGUH.

PENDAHULUAN

Pekerja sektor informal memegang peranan penting dalam perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan menopang sektor usaha kecil menengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), lebih dari 60% tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024 juga mencatat jumlah pekerja informal mencapai 84,13 juta orang (59,17% dari total tenaga kerja), dengan konsentrasi terbesar pada sektor perdagangan dan pertanian.

Pekerja sektor informal, seperti pedagang kaki lima, pekerja lepas, dan buruh tani, umumnya bekerja di luar sistem formal tanpa perlindungan hukum yang memadai, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan (International Labour Organization, 2023). Kerentanan ini mencakup risiko ketidakstabilan pendapatan, kondisi kerja berbahaya, hingga ketiadaan perlindungan saat terjadi kecelakaan kerja atau kematian. Meski pemerintah telah mengeluarkan regulasi, seperti Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pekerja di Sektor Informal, tingkat perlindungan sosial yang diterima pekerja informal masih jauh dari ideal. Situasi nasional ini juga tercermin dalam konteks daerah, termasuk Kabupaten Kendal.

Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, kondisi pekerja sektor informal menunjukkan tantangan yang serupa. Data Sakernas Agustus 2023 menunjukkan 59,7% dari 597.958 penduduk yang bekerja berada di sektor informal. Namun, menurut data BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendal, hanya 38,57% dari total pekerja yang menjadi peserta aktif jaminan sosial, dan pada sektor informal angkanya bahkan hanya sekitar 7%. Rendahnya cakupan ini menandakan perlunya strategi peningkatan kesadaran dan partisipasi pekerja. Salah satu lokasi yang menggambarkan persoalan tersebut adalah Pasar Weleri sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Pasar Weleri, sebagai salah satu pusat perekonomian lokal, menunjukkan potret nyata tingginya kerentanan pekerja informal. Mayoritas pedagang pasar bekerja di luar sistem perlindungan formal dan belum terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) maupun Jaminan Kematian (JKM). Peristiwa kebakaran besar pada 12 November 2020 yang menghanguskan hampir seluruh bangunan pasar menegaskan minimnya jaring pengaman sosial bagi para pedagang, di mana banyak dari mereka kehilangan mata pencarian tanpa dukungan asuransi ketenagakerjaan. Kondisi ini memperkuat urgensi upaya sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran pekerja informal.

Berbagai penelitian terdahulu terkait kesadaran dan partisipasi pekerja sektor informal dalam jaminan sosial (Rani Mailina & Yusrizal, 2023; Syachrezi et al., 2023; Mu'adz Abdul Aziz & Yuliarmi, 2022) menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran pekerja merupakan kendala utama partisipasi dalam BPJS Ketenagakerjaan, sementara sosialisasi yang efektif terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan keikutsertaan. Namun, sebagian besar penelitian dilakukan di kota besar atau kawasan wisata, sehingga belum banyak mengkaji strategi sosialisasi di pasar tradisional yang memiliki karakter sosial ekonomi berbeda. Hal inilah yang membuka celah penelitian dan sekaligus membangun urgensi studi di Pasar Weleri.

Strategi penumbuhan kesadaran pekerja sektor informal terhadap program perlindungan sosial dapat mengacu pada empat pendekatan yang dikemukakan oleh Santoso dan Rahayu (2020), yakni edukasi dan penyuluhan, pendekatan partisipatif, penguatan jaringan sosial, serta dukungan regulasi dan insentif. Kerangka ini menjadi acuan dalam penelitian ini untuk merancang strategi sosialisasi yang relevan dengan konteks sosial ekonomi Pasar Weleri.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menitikberatkan pada perancangan strategi sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal, khususnya dengan menerapkan kerangka Santoso dan Rahayu (2020). Keempat strategi tersebut edukasi, partisipasi, penguatan jejaring, serta dukungan regulasi dan insentif diterapkan dalam konteks pasar tradisional dengan karakteristik unik yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, tujuan utama artikel ini adalah merumuskan strategi sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan yang tepat dan efektif bagi pekerja sektor informal di Kabupaten Kendal, khususnya pedagang di Pasar Weleri.

LITERATUR

Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal

Perlindungan sosial merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan kerentanan sosial, sekaligus menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Huraerah (2022), perlindungan sosial meliputi upaya preventif, kuratif, dan responsif untuk menjaga kesejahteraan masyarakat ketika menghadapi risiko sosial dan ekonomi. Suharto (2014) mengelompokkan perlindungan sosial ke dalam empat bentuk utama: bantuan sosial, asuransi sosial, kebijakan pasar kerja, dan jaring pengaman sosial berbasis komunitas. Asian Development Bank (ADB) menekankan bahwa perlindungan sosial harus bersifat terintegrasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan masyarakat.

Jaminan sosial merupakan bagian dari perlindungan sosial yang bertujuan menjamin pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi masyarakat ketika menghadapi penurunan pendapatan atau risiko sosial lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, jaminan sosial diselenggarakan oleh BPJS dan mencakup perlindungan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hingga risiko pensiun. Menurut Suharto (2013), jaminan sosial tenaga kerja berperan penting dalam melindungi pekerja dari risiko hubungan kerja dan lingkungan kerja.

Dua program utama yang relevan bagi pekerja sektor informal adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, JKK memberikan perlindungan berupa pembiayaan medis, santunan tidak mampu bekerja, santunan cacat, rehabilitasi, hingga beasiswa bagi anak peserta. Sementara itu, JKM memberikan manfaat berupa santunan kematian, biaya pemakaman, serta beasiswa pendidikan bagi dua anak peserta yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja. Kedua program ini dapat diikuti oleh pekerja sektor informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) melalui mekanisme pendaftaran mandiri.

Pekerja Sektor Informal dan Karakter Sosial Ekonomi Lokal

A. Pekerja Sektor Informal

Menurut International Labour Organization (ILO, 2018), pekerja sektor informal adalah pekerja yang menjalankan aktivitas ekonomi di luar sistem hubungan kerja formal, tanpa kontrak, pendapatan stabil, maupun perlindungan sosial. Edi Suharto (2011) menegaskan bahwa sektor informal mencakup usaha kecil, pekerjaan mandiri, dan tenaga kerja keluarga tanpa upah tetap. Kelompok ini menghadapi risiko kerja tinggi, pendapatan tidak menentu, dan akses terbatas terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga tingkat kerentanannya lebih besar dibanding pekerja formal. Hak-hak pekerja informal dijamin melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk JKK dan JKM, meski kewajibannya meliputi pendaftaran mandiri, pembayaran iuran rutin, serta pelaporan klaim tepat waktu. Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut sering terkendala oleh rendahnya pendapatan, literasi jaminan sosial, dan persepsi bahwa iuran menjadi beban tambahan.

B. Karakter Sosial Ekonomi Lokal

Karakter sosial ekonomi lokal merujuk pada struktur sosial dan pola ekonomi suatu komunitas yang terbentuk dari interaksi sosial, budaya, dan mata pencarian masyarakat. Chambers (1983) menyatakan bahwa karakter lokal tercermin dari relasi sosial, ketahanan ekonomi rumah tangga, serta kemampuan komunitas mengakses sumber daya. Scoones (1998) mengaitkan karakter lokal dengan aset sosial, ekonomi, fisik, dan institusional yang memengaruhi strategi nafkah masyarakat. Dalam konteks pasar tradisional, karakter sosial ekonomi lokal ditandai oleh: Pola kerja berbasis keluarga atau usaha mikro, Pendapatan harian yang fluktuatif dan tidak stabil, Interaksi sosial komunal dengan sistem kepercayaan (trust) yang kuat antarpedagang, Akses terbatas pada lembaga formal, termasuk jaminan sosial. Ketergantungan pada jejaring komunitas dalam pertukaran informasi dan dukungan sosial. Karakter-karakter ini menentukan bagaimana pekerja informal memandang manfaat dan kewajiban jaminan sosial, sekaligus menentukan bentuk strategi sosialisasi yang paling efektif.

Kesadaran Pekerja Sektor Informal terhadap Perlindungan Sosial

Kesadaran merupakan kondisi di mana individu memahami keberadaan diri, lingkungan, dan pentingnya suatu objek atau tindakan (Kainth, 2009). Zeman (2001) menjelaskan bahwa kesadaran mencakup proses reflektif yang memungkinkan seseorang menilai situasi dan mengambil keputusan secara sadar. Menurut Siswoyo et al. (2015), kesadaran memiliki tingkatan mulai dari unaware, recognition, recall, hingga top of mind, yang dipengaruhi oleh faktor usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendidikan. Semakin tinggi tingkat kesadaran, semakin besar kemungkinan individu memahami manfaat jaminan sosial dan terlibat secara aktif.

Pada pekerja sektor informal, rendahnya kesadaran umumnya dipengaruhi oleh: akses informasi yang terbatas, literasi jaminan sosial yang rendah, persepsi bahwa iuran tidak terjangkau, dan belum adanya dukungan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran menjadi langkah awal yang penting dalam meningkatkan partisipasi pekerja informal dalam program JKK dan JKM.

Strategi Penumbuhan Kesadaran Pekerja Sektor Informal

Strategi merupakan rencana komprehensif untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif. Dalam konteks perlindungan sosial, strategi tidak hanya mencakup perencanaan teknis tetapi juga respons adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan (Septian & Wulandari, 2024). Strategi efektif harus menggabungkan pendekatan top-down dan bottom-up serta memberdayakan komunitas. Sutyo (2023) menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan pusat dan praktik lokal, termasuk peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Santoso dan Rahayu (2020) mengidentifikasi empat pendekatan utama dalam meningkatkan kesadaran pekerja informal terhadap BPJS Ketenagakerjaan: Edukasi dan penyuluhan mengenai manfaat jaminan sosial, Pendekatan partisipatif melalui pelibatan pekerja informal dalam forum atau diskusi. Penguatan jejaring sosial seperti kelompok pedagang atau pengurus pasar, Dukungan regulasi dan insentif untuk meringankan beban iuran atau mempermudah pendaftaran. Keempat strategi tersebut saling melengkapi dan harus disesuaikan dengan karakter sosial ekonomi lokal agar partisipasi pekerja informal meningkat secara signifikan.

Peran Pekerja Sosial dalam Peningkatan Partisipasi Pekerja Sektor Informal

Pekerja sosial berperan strategis dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi pekerja informal melalui edukasi, advokasi, mediasi, fasilitasi akses, dan pemberdayaan. Berdasarkan prinsip pekerjaan sosial seperti penerimaan, kerahasiaan, individualisasi, pemberdayaan, dan tanggung jawab sosial (Sheafor & Horejsi, 2011), pekerja sosial dapat membangun hubungan kepercayaan dengan komunitas pekerja informal.

Dalam praktik, pekerja sosial menggunakan metode COCD (*Community Organization and Community Development*) untuk mengorganisasi komunitas dan meningkatkan kapasitas sosial, FGD (*Focus Group Discussion*) untuk menggali kebutuhan dan persepsi pekerja, *Capacity Building* untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kesadaran pekerja informal. Dengan peran tersebut, pekerja sosial menjadi aktor kunci dalam memfasilitasi pekerja informal agar memahami manfaat jaminan sosial serta berpartisipasi aktif dalam program JKK dan JKM.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai strategi penumbuhan kesadaran pekerja sektor informal di Pasar Weleri terhadap program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Data mentah hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat secara rinci dalam catatan lapangan, kemudian diringkas dengan memilih informasi yang relevan dan menghilangkan bagian yang tidak sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi dilakukan secara berkelanjutan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema utama, seperti pemahaman pekerja terhadap jaminan sosial, motivasi keikutsertaan, hambatan, dan strategi penyadaran. Tahap ini bertujuan menemukan pola dan hubungan antartema sehingga memudahkan dalam pembentukan kesimpulan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Penyajian dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam kategori seperti hambatan keikutsertaan, peran BPJS Ketenagakerjaan, tingkat pemahaman pekerja, serta bentuk strategi sosialisasi yang berjalan. Jika diperlukan, data diperkuat dengan tabel atau matriks untuk memperjelas pola dan memudahkan pembaca memahami isi temuan.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Kesimpulan ditarik dari data yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan fokus penelitian. Peneliti menghubungkan temuan dengan teori yang relevan untuk memastikan konsistensi analitis. Verifikasi dilakukan melalui pengecekan ulang temuan serta diskusi bersama pembimbing guna menjamin validitas, kredibilitas, dan objektivitas hasil penelitian. Hasil akhir memberikan gambaran nyata mengenai kondisi kesadaran pekerja sektor informal sekaligus rekomendasi bagi pengembangan strategi perlindungan sosial.

Informan pada penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, terdiri dari petugas BPJS Ketenagakerjaan, pengurus paguyuban pedagang, peserta JKK-JKM, dan pekerja sektor informal yang belum menjadi peserta. Lokasi penelitian berada di Pasar Weleri, Kabupaten Kendal, yang dipilih secara purposif karena menjadi pusat aktivitas ekonomi dan target sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang Strategi Penumbuhan Kesadaran Pekerja Sektor Informal Pasar Weleri dalam Keikutsertaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dilihat dari aspek Edukasi dan Penyuluhan, Pendekatan Partisipasi, Penguatan Jaringan, dan Kebijakan dan Insentif yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Edukasi dan Penyuluhan

Edukasi dan penyuluhan menjadi strategi awal dalam meningkatkan kesadaran pekerja sektor informal mengenai program JKK dan JKM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dilakukan melalui ceramah, penyebaran brosur, media sosial, serta aplikasi JMO. Informan BPJS menjelaskan bahwa frekuensi penyuluhan masih belum rutin sehingga pemahaman pekerja belum merata.

Salah satu informan pekerja menyatakan: "Saya sebenarnya pernah dengar soal JKK-JKM, tapi penjelasannya waktunya sebentar dan bahasanya susah, jadi saya masih bingung manfaatnya apa." (Informan W, 42 tahun) Kutipan ini menunjukkan bahwa bahasa teknis dan waktu penyuluhan yang terbatas menghambat pemahaman pekerja, sejalan dengan Santoso dan Rahayu (2020) yang menekankan pentingnya edukasi yang jelas dan mudah dipahami. Penyebaran informasi melalui jaringan informal antar-pedagang memang efektif, tetapi berisiko menghasilkan informasi yang tidak akurat. Temuan ini mengindikasikan perlunya penyederhanaan bahasa, intensifikasi penyuluhan, penggunaan media yang dekat dengan pekerja pasar, serta penguatan peran komunitas sebagai penghubung informasi.

Pendekatan Partisipasi

Pendekatan partisipatif dilakukan melalui pelibatan paguyuban pedagang, forum tatap muka, dan diskusi kelompok. Namun, pelibatan masih dominan pada tingkat perwakilan dan belum menyentuh seluruh individu secara merata. Seorang pengurus paguyuban mengungkapkan: "Kami biasanya dapat undangan rapat, tapi tidak semua pedagang ikut. Jadi informasi kadang berhenti di pengurus, tidak selalu turun ke anggota." (Informan N, 47 tahun)

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi belum bersifat dua arah dan sistematis. Aspirasi pekerja belum sepenuhnya diakomodasi karena forum masih bersifat satu arah dan minim tindak lanjut. Kendala literasi digital juga mengurangi efektivitas kanal konsultasi daring. Sesuai teori Santoso dan Rahayu (2020), partisipasi efektif membutuhkan pelibatan sejak tahap perencanaan, forum rutin, dan mekanisme umpan balik yang jelas. Tanpa hal tersebut, pekerja tidak merasa memiliki program, sehingga partisipasi sulit berkelanjutan.

Penguatan Jaringan

Jaringan sosial seperti paguyuban pedagang berperan kuat dalam menyebarkan informasi mengenai program JKK dan JKM. Jalur informal antar-pedagang dianggap lebih mudah dipahami dibandingkan media formal. Seorang pedagang mengungkapkan: "Biasanya saya tahu info dari teman-teman di lapak sekitar, bukan dari penyuluhan resmi. Kalau dari orang dekat lebih cepat masuk." (Informan R, 52 tahun)

Namun, ketergantungan pada jaringan informal membuat distribusi informasi tidak merata. Jika pengurus tidak aktif, informasi tidak tersebar. Selain itu, akses digital yang terbatas menghambat penyebaran informasi melalui grup WhatsApp dan media sosial. Sesuai teori Santoso dan Rahayu (2020), jaringan sosial efektif dalam membentuk kesadaran kolektif, tetapi perlu penguatan struktur agar tidak bergantung pada individu tertentu. Strategi kolaborasi antar-lembaga perlu dibuat lebih sistematis agar jangkauan informasi meningkat dan literasi pekerja semakin baik.

Kebijakan dan Insentif

Kebijakan daerah seperti Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2021 dan insentif subsidi iuran bulan pertama berkontribusi meningkatkan minat awal pekerja. Namun, keberlanjutan peserta masih rendah setelah subsidi berakhir. Seorang peserta yang pernah menerima subsidi mengatakan: "Waktu awal ikut karena dapat subsidi. Tapi begitu bayar sendiri setiap bulan, saya berat, apalagi pendapatan tidak pasti." (Informan S, 49 tahun)

Kutipan ini menunjukkan bahwa aspek finansial menjadi hambatan utama dalam mempertahankan kepesertaan. Selain itu, sosialisasi mengenai kebijakan dan mekanisme subsidi belum merata sehingga banyak pekerja tidak mengetahui adanya dukungan tersebut. Efektivitas kebijakan membutuhkan sosialisasi yang lebih terstruktur, pendampingan lanjutan, serta pelibatan komunitas secara aktif agar partisipasi tidak hanya bersifat sementara.

KESIMPULAN

Kesadaran pekerja sektor informal di Pasar Weleri terhadap program JKK dan JKM masih beragam dan belum mampu mendorong partisipasi secara optimal. Rendahnya literasi digital, terbatasnya akses layanan, minimnya pemahaman mengenai manfaat program, serta belum efektifnya strategi sosialisasi menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran membutuhkan pendekatan yang terintegrasi melalui edukasi berkelanjutan, penguatan komunitas,

pemanfaatan jaringan sosial, serta dukungan regulasi dan insentif. Rancangan Program JEMPOL TANGGUH diusulkan sebagai strategi yang dapat memperkuat literasi, kapasitas komunitas, dan kolaborasi lintas sektor.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain jumlah informan yang hanya berfokus pada Pasar Weleri, waktu pengumpulan data yang relatif singkat, serta keterbatasan data dokumentatif dari komunitas sehingga beberapa temuan masih bergantung pada persepsi informan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah studi, menggunakan pendekatan metode campuran, serta menguji efektivitas program berbasis komunitas secara longitudinal, termasuk mengeksplorasi potensi teknologi digital dalam penyebaran informasi terkait jaminan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S., & Prawitno, A. (2015). Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(2), 93–104. Diakses melalui <https://jurnal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/110> pada tanggal 26 Februari 2025.
- Adi Fahrudin. (2014). Pengantar kesejahteraan sosial. Bandung: Alfabeta
- Asian Development Bank. (2013). Social Protection Operational Plan 2014–2020: Promoting Inclusive Growth. Manila: ADB. Pada 26 Februari 2025.
- Aziz, M. A., & Yuliarmi, N. N. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pekerja informal dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Kota Denpasar. Jurnal Pekerjaan Sosial, 9(1), 45–57. Diakses melalui <https://jurnal.harianregional.com/eep/id-98737> pada 23 Januari 2025.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024. Badan Pusat Statistik. Diakses melalui. Pada 23 Januari 2025.
- Bisjoe, A. R. H. (2018). Menjaring Data dan Informasi Penelitian Melalui FGD (Focus Group Discussion): Belajar dari Praktik Lapang. Info Teknis EBONI, 15(1), 17–27. Diakses melalui <https://www.neliti.com/publications/491912/menjaring-data-dan-informasi-penelitian-melalui-fgd-focus-group-discussion-belaj> pada 16 Maret 2025.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2020). Panduan program JKK dan JKM untuk pekerja informal. BPJS Ketenagakerjaan. Diakses melalui <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html> pada 23 Januari 2025.
- Dwi Heru Sukoco. (1991). Profesi pekerjaan sosial dan proses pertolongan. KOPMA STKS Bandung.
- Fahrudin, M. (2012). Teori dan praktik pekerjaan sosial di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Grindle, M. S. (1997). Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries. Harvard University Press.
- Haris, A. M. A. (2023). Pengantar metode praktik pekerjaan sosial. Yogyakarta: Deepublish.
- Hastjarjo, D. (2005). Sekilas tentang kesadaran (consciousness). Buletin Psikologi, 13(2), 118–125. pada 24 Januari 2025.
- Huraerah, A. (2022). Kesejahteraan Sosial dan Kebijakan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- International Labour Organization (ILO). (2018). Women and men in the informal economy: A statistical picture. Geneva: International Labour Organization. Diakses melalui <https://www.ilo.org/publications/women-and-men-informal-economy-statistical-picture-third-edition> pada 24 Januari 2025.
- Irawan, R. (2016). Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Milen, A. (2006). What Do We Know About Capacity Building? An Overview of Existing Knowledge and Good Practice. Geneva: WHO. Pada 12 April 2025.
- Nilasari, S. (2013). Manajemen strategi itu gampang untuk pemula & orang awam. Jakarta: Dunia Cerdas. Diakses melalui <https://eskripsi.usm.ac.id/detail-G31A-960.html> pada 25 Januari 2025.
- Ocktilia, H., & Vijayanti, D. (2018). Perlindungan sosial bagi keluarga miskin peserta Program Keluarga Harapan di Kabupaten Buton Selatan. PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, 17(1), 13–24. Diakses melalui https://jurnal.poltekkesos.ac.id/index.php/lindayosos/article/view/216/177_pada 19 Juni 2025.
- Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal. Pada 10 April 2025.
- Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269882/perbup-kab-kendal-no-40-tahun-2023> pada 20 Mei 2025.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Diakses melalui <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html> pada 25 Januari 2025.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195976/permenaker-no-5-tahun-2021> pada 25 Januari 2025.

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5612> pada 25 Januari 2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5614/pp-no-46-tahun-2015> pada 25 Januari 2025.
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Pekerja di Sektor Informal. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41479/perpres-no-109-tahun-2013> pada 25 Januari 2025
- Sampson, M., & Kenny, C. (2016). Social protection systems in developing countries: The role of the informal sector. *Journal of Development Studies*, 52(1), 103–122.
- Santoso, M., & Rahayu, D. S. (2020). Strategi penumbuhan kesadaran pekerja informal terhadap program JKK dan JKM di Indonesia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 6(1), 34–45. Diakses melalui pada 24 Januari 2025.
- Sheafor, W. B., & Horejsi, C. R. (2003). *Techniques and Guidelines for Social Work Practice*. Pearson.
- Siswoyo, B. E., Prabandari, Y. S., & Hendrartini, Y. (2015). Kesadaran pekerja sektor informal terhadap program jaminan kesehatan nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 4(4), 118–125. Diakses melalui <https://journal.ugm.ac.id/jkki/article/view/36116/21123> pada 24 Januari 2025.
- Soleh, A., et al. (2013). *Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Permasalahan Sosial dan Penanganannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Surat Edaran Nomor 400/4450/2022 tentang Gerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kendal Peduli Pekerja Rentan. Pada 10 April 2025.
- Surat Edaran Nomor 500.15.14.2/250/DISPERINAKER tentang Gerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kendal Peduli Pekerja Rentan. Pada 10 April 2025.
- Syachrezi, R., Martini, R., & Marlina, N. (2023). Implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Majapahit. *Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik*, 5(2), 123–138. Diakses melalui <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/40728/29695> pada 24 Januari 2025.
- Syamsudin, A. B. (2017). Benang-benang merah teori kesejahteraan sosial (Edisi ke-1). Ponorogo: WADE.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39268> pada 25 Januari 2025.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40787> pada 25 Januari 2025.
- UNDP. (2009). *Capacity Development: A UNDP Primer*. United Nations Development Programme.
- World Health Organization. (2012). *Health system financing: The path to universal health coverage*. World Health Organization.